

STRATEGI RESILIENSI KELAS PEKERJA PREKARIAT INFORMAL DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI JAKARTA

Rusfadia Saktiyanti Jahja¹, Hartati Sulistyono Rini², Robertus Robet³, Marista
Christina Shally Kabelen⁴, Atik Kurniawati⁵

^{1,3,4,5} Prodi Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta,

² Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Negeri Semarang,

¹rjahja@unj.ac.id, ²hartatisulistyorini@mail.unnes.ac.id,

³robertusrobet@gmail.com, ⁴maristashally@unj.ac.id, ⁵atikkurniawati@unj.ac.id

ABSTRAK

Pekerja prekariat ditandai dengan keadaan kerja yang tidak menentu, kondisi ketidakstabilan sosial ekonomi, dan kurangnya jaminan sosial. Akibat perubahan struktur ekonomi di seluruh dunia, otomatisasi, dan sistem kerja yang lebih fleksibel, membuat fenomena ini semakin meningkat. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mempelajari masalah yang dihadapi pekerja prekariat serta mengembangkan metode untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran (mixed methods) lewat penelitian lapangan yang dilengkapi dengan analisis data sekunder. Penelitian ini berlangsung sejak bulan Februari-Juli 2025. Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi utama yang dapat diterapkan oleh pekerja prekariat, diantaranya memiliki sistem nilai yang teguh dalam memandang masa depan, pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan usaha kecil, membangun solidaritas komunitas, peningkatan keterampilan dan pendidikan diri, serta mendorong kebijakan publik yang inklusif.

Kata Kunci: *Kelas Pekerja Prekariat, Kesejahteraan Sosial, Strategi Resiliensi.*

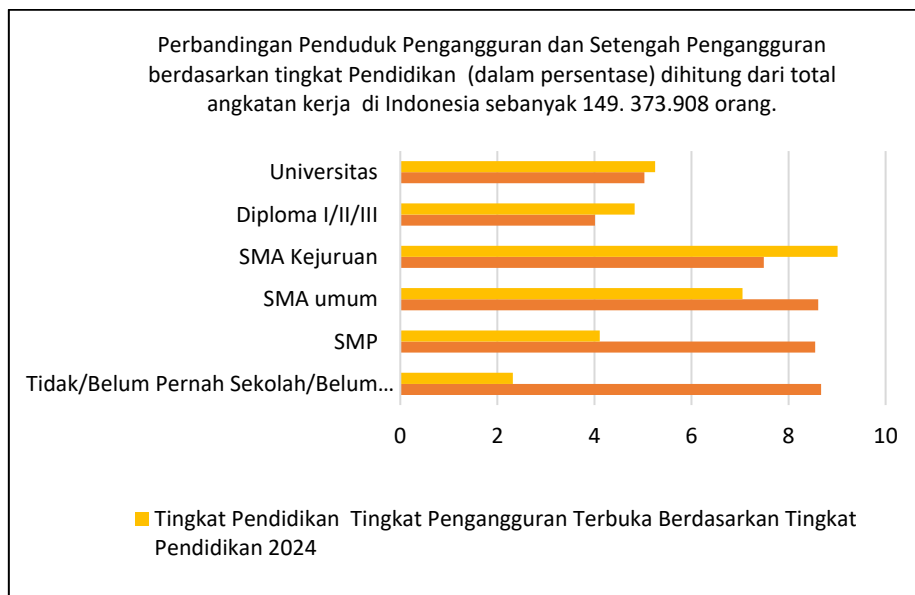
A. PENDAHULUAN

Fenomena pekerja prekariat di Indonesia saat ini semakin marak. Dalam kondisi ketidakpastian seperti sekarang ini individu dan perusahaan berusaha mencari strategi bertahan sendiri-sendiri untuk bertahan hidup. Secara definisi, prekariat diartikan sebagai kelompok sosial yang memiliki kondisi kerja tidak stabil, tidak memiliki identitas, dengan kepemilikan hak yang tidak jelas (Standing, 2011: 20). Definisi lainnya juga bisa dikatakan sebagai

kelompok orang yang bekerja namun tidak bisa memiliki jaminan pekerjaan jangka panjang.(Standing 2012:589) Kondisi kerja yang penuh dengan ketidakpastian ini membuat keadaan mereka rentan dan tidak memiliki jaminan sosial. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membuat jaminan sosial mandiri baik itu jaminan kesehatan maupun jaminan hari tua.

Berdasarkan data yang ada di Indonesia dengan kondisi penduduk yang ada sekarang ini, berdasarkan perbandingan angkatan kerja yang ada 36%-nya merupakan penduduk pengangguran dan setengah pengangguran. Mereka yang dikatakan setengah pengangguran adalah orang yang bekerja tidak sesuai kompetensinya atau jumlah jam kerja yang belum sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan.

Grafik 1. Perbandingan Tingkat Pengangguran terbuka dan setengah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan di Indonesia



Sumber: (BPS, 2024).

Berdasarkan data ini, nampak terlihat bahwa lulusan SMK lebih banyak yang mengalami situasi menganggur, yang mana hal ini juga dialami oleh lulusan perguruan tinggi baik itu diploma maupun sarjana.

Berdasarkan data BPS tahun 2024 jumlah pekerja tidak tetap atau freelance sejumlah 46,67 juta orang, proporsi sebesar 32% dari total angkatan kerja yang mencapai 149,37 juta jiwa pada Februari 2024. Jumlah pekerja yang tidak penuh bekerja, yang terdiri dari setengah penganggur dan paruh waktu pada bulan Februari 2024 berjumlah 23.542.277 orang. Fenomena

peningkatan pekerja prekariat akibat perubahan ekonomi global, otomasi, dan sistem kerja fleksibel.

Grafik 2. Jumlah Pekerja yang terkategori Prekariat di Indonesia



Sumber: (BPS, 2018, 2020b, 2022, 2024)

Dengan kondisi kehidupan mereka yang tidak menentu membuat mereka memerlukan pentingnya strategi dalam mencapai kesejahteraan sosial dengan cara mereka sendiri. Oleh karena itu makalah ini ingin menjawab beberapa pertanyaan penting. Pertama, apa tantangan utama yang dihadapi kelas pekerja **prekariat** di Jakarta? Strategi apa yang mereka gunakan untuk mencapai kesejahteraan sosial? Bagaimana peran negara, serikat pekerja, dan komunitas dalam mendukung kelas pekerja **prekariat** untuk memperbaiki kehidupan.

Fokus studi pada penelitian ini adalah pekerja prekariat yang ada di sektor informal. mereka adalah orang yang bekerja sesuai kontrak yang tidak pasti masa kerjanya, jenjang karier dan nasibnya tidak jelas, namun banyak yang berasal dari kelompok terdidik. Sehingga bisa dikatakan karakteristik pekerja **prekariat**: pekerjaan tidak tetap, gaji rendah, tanpa jaminan sosial, dan ketidakpastian ekonomi.

Guy Standing mendefinisikan prekariat sebagai : *a social class formed by people suffering from precarity, which is a condition of existence without predictability or security, affecting material or psychological welfare.*

Jika didefinisikan ada 5 tipologi pekerja dalam sistem ketenagakerjaan yang ada di dunia, diantaranya adalah : Owner atau Pemilik Modal, Salarariat (Pekerja yang mendapatkan upah rutin dan mencukupi), Professional (Pekerja yang bekerja berdasarkan sistem kontrak namun, dibayar dengan upah tinggi), Proletariat (Pekerja/Buruh yang mengabdikan pada tuan tertentu dan dibayar minim dengan jam kerja panjang, dan Prekariat (Pekerja dengan jaminan kerja yang

tidak jelas, upah minim, dan menggunakan modal sendiri untuk bekerjasama dengan pihak lain) (Standing 2011)



Berikut ini disajikan pemetaan Teori Kesejahteraan Sosial yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

No.	Nama Ahli	Definisi	Fokus Utama	Indikator	Sumber
1	Richard M. Titmuss	Sistem terorganisasi untuk mengatasi risiko sosial.	Pencegahan dan penanganan risiko sosial.	<ul style="list-style-type: none"> Akses terhadap layanan sosial (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial) Sistem perlindungan terhadap risiko (kemiskinan, pengangguran, disabilitas) Intervensi negara dalam mengatasi kesenjangan 	Titmuss (1974), <i>Social Policy: An Introduction</i>
2	Wilensky & Lebeaux	Upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial melalui pelayanan sosial.	Pelayanan sosial struktural.	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dan akses terhadap pelayanan sosial Peran institusi sosial dalam pemenuhan kebutuhan Kualitas pelayanan sosial masyarakat 	Wilensky & Lebeaux (1965), <i>Industrial Society and Social Welfare</i>

No.	Nama Ahli	Definisi	Fokus Utama	Indikator	Sumber
3	T.H. Marshall	Hak sosial sebagai bagian dari kewarganegaraan.	Hak sosial dan keadilan dalam masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak-hak sosial (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) • Partisipasi sosial dan politik • Kesetaraan dan keadilan sosial 	Marshall (1950), <i>Citizenship and Social Class</i>
4	Dunlop	Kebijakan dan praktik untuk mengatasi masalah sosial.	Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemiskinan dan pengangguran • Akses terhadap jaminan sosial • Ketimpangan distribusi sumber daya 	Dunlop (1981), <i>The Welfare State</i>
5	James Midgley	Sistem institusional dari negara untuk kesejahteraan warga.	Keterlibatan negara dan kebijakan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> • Peran negara dalam penyediaan layanan sosial • Efektivitas kebijakan sosial • Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial 	Midgley (1995), <i>Social Development</i>
6	Suparlan (Indonesia)	Pemenuhan kebutuhan material, spiritual, sosial agar hidup layak dan berkembang.	Kebutuhan dasar dan pengembangan diri.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan dasar terpenuhi (sandang, pangan, papan) • Kesejahteraan spiritual dan sosial • Potensi diri berkembang secara optimal 	Suparlan (2005), <i>Kemiskinan di Perkotaan</i>
7	Bambang Shergi Laksmono (Indonesia)	Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk hidup layak, bermartabat, dan produktif.	Kehidupan bermartabat dan produktivitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Kehidupan yang layak dan bermartabat • Produktivitas individu dan keluarga • Kualitas hidup masyarakat 	Laksmono (2007), <i>Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia</i>

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber (2025)

Indikator kesejahteraan sosial bagi pekerja: pendapatan, jaminan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, dan keseimbangan kerja-hidup.

Dalam hal ini negara memiliki peran penting sebagai institusi yang menjamin kesejahteraan sosial pekerja yang dilindungi lewat Undang-undang. Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harapannya bisa melindungi hak-hak pekerja. Namun dengan perkembangan sekarang ini sulit sekali menggantungkan harapan

pada negara karena ternyata undang-undang ini lebih banyak berpihak pada pemilik modal. Sehingga para pekerja prekariat harus memperjuangkan hak mereka dengan memanfaatkan media-media lain.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode campuran (mixed method) (W. Lawrence Neuman 2014) yang menggabungkan teknik pengumpulan data lewat studi kasus, dengan metode wawancara mendalam dan pengolahan data sekunder. Informan yang diwawancarai sejumlah sepuluh orang dan dipilih secara purposif di Jakarta berdasarkan kriteria: Usia 20-50 tahun, dengan gender laki-laki dan Perempuan yang merupakan pekerja di sektor informal aktif dengan ciri sebagai prekariat.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tantangan yang Dihadapi Kelas Pekerja Prekariat

Penelitian ini menemukan bahwa pekerja prekariat di wilayah perkotaan seperti Jakarta dan Semarang menghadapi tantangan berat dalam menjaga keberlangsungan hidup dan upaya mobilitas sosial. Meski beragam profesi dan latar belakang, mereka memiliki satu kesamaan: hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian dan keterbatasan sistemik. Berikut ini adalah tiga tantangan utama yang ditemukan.

1. Ketidakpastian Situasi Pekerjaan

Ketidakpastian merupakan benang merah dari semua cerita para informan. Tidak adanya kontrak kerja, tidak jelasnya pendapatan harian, hingga fluktuasi pelanggan membuat pekerjaan mereka sangat rentan. Misalnya **Ani (25 tahun)**, seorang penjual es teh Solo, hanya mengandalkan penjualan harian antara 150-200 gelas. Ia dibayar secara harian berdasarkan omzet yang didapat, dengan kisaran harga jual Rp3.000–4.000 per gelas. Lain lagi dengan ibu Isnaini pedagang soto Surabaya, ia memiliki 2 orang anak berdagang sendiri, karena suaminya sudah meninggal. Berangkat setiap pagi dari tempat tinggal dia di kawasan Pulo Gadung, dan mendorong gerobak soto untuk berjualan di trotoar jalan Pemuda di depan sekolah. Pada saat satpol PP datang dia akan buru-buru pergi meninggalkan trotoar itu supaya tidak ditangkap.

“Kalau pelayanannya nggak ramah atau teh-nya terlalu encer, pelanggan bisa kabur ke tempat lain,” ungkap Ani.

Kondisi serupa dialami **Uki (32 tahun)**, pekerja sektor informal yang menggabungkan

pekerjaan tukang parkir dengan jasa sewa mainan anak. Meski tampak sederhana, ia bekerja setiap hari dari pagi hingga sore tanpa jaminan pelanggan tetap. Setiap hari adalah pertarungan baru.

“Kalau pelanggan anak-anak nggak datang, ya penghasilan hari itu bisa turun drastis. Makanya saya harus disiplin, buka tepat waktu, jaga pelayanan.”

Lebih jauh, **Wahyu (40 tahun)**, seorang sarjana hukum yang sebelumnya bekerja di PT Angkasa Pura, menyampaikan bahwa beralih ke usaha mandiri setelah gagal dalam budidaya ikan arwana adalah sebuah langkah berat.

“Hidup saya berubah drastis setelah keluar dari dunia kerja formal. Tapi saya belajar bertahan, belajar usaha dari nol. Sekarang jual ayam geprek dan es teh sambil menabung buat buka warkop.”

Kisah mereka mencerminkan realitas bahwa bekerja di sektor informal bukanlah pilihan bebas, melainkan hasil dari keterdesakan dan keinginan untuk bertahan. Mereka menghadapi situasi ketidakpastian yang sulit diprediksi, oleh karena itu diperlukan kalkulasi ekonomi yang cermat berdasarkan kemampuan kognitif yang mereka miliki. (Beckert, 2018)

2. Kurangnya Jaminan Sosial

Ketiadaan kontrak formal berimplikasi langsung pada absennya perlindungan sosial. Dari wawancara, diketahui bahwa sebagian besar informan tidak memiliki BPJS Kesehatan, apalagi jaminan ketenagakerjaan. Beberapa seperti **Wahyu** yang dulunya karyawan tetap, sempat memiliki BPJS, tetapi pasca keluar tidak dilanjutkan karena tidak ada kewajiban dan kemampuan untuk membayar iuran rutin.

“Dulu punya BPJS waktu masih kerja, sekarang sudah nggak aktif. Fokus dulu ke usaha kecil ini,” kata Wahyu.

Uki juga tidak memiliki asuransi apa pun, dan lebih mengandalkan tabungan pribadi jika terjadi hal mendesak. Baginya, “uang tunai” jauh lebih penting daripada “jaminan di atas kertas”.

Sebagian pekerja rumah tangga yang diwawancarai bahkan tidak mengetahui hak-hak dasar seperti cuti sakit atau akses terhadap layanan kesehatan. Mereka bekerja antara 2–3 jam per hari dengan upah sekitar Rp700.000–1.000.000 per bulan — dibayar tergantung kesepakatan. Perlindungan hukum terhadap mereka praktis tidak ada.

Sementara itu, pekerja batik rumahan di Jawa juga mengalami hal serupa. Mereka menerima order menjahit berdasarkan kebutuhan industri kecil, dengan upah per potong atau

per kodi. Jika tidak ada pesanan, mereka tidak bekerja, dan tidak ada kompensasi yang bisa mereka harapkan.

3. Upah Rendah dan Eksploitasi Terselubung

Penghasilan yang diterima oleh para pekerja prekariat ini sebagian besar jauh di bawah standar hidup layak. Di kota besar seperti Jakarta, biaya hidup per orang diperkirakan mencapai Rp80.000–100.000 per hari. Namun, realitanya, penghasilan **Uki, Ani**, dan para pekerja rumahan jarang menyentuh angka itu, bahkan ketika mereka bekerja penuh waktu.

Ani, misalnya, hanya mengandalkan pendapatan harian yang sangat tergantung pada lokasi dan cuaca. Jika hujan, dagangan es teh tidak laku, dan itu berarti "nol penghasilan". Tidak ada gaji tetap, tidak ada cuti.

"Kalau lagi sepi pembeli, ya harus terima. Nggak bisa ngeluh," katanya singkat.

Wahyu juga mengalami tekanan untuk menghidupi keluarganya dari penghasilan berjualan makanan. Meski begitu, ia tetap punya visi jangka panjang: menyisihkan hasil dagangannya untuk mendirikan **Lembaga Bantuan Hukum (LBH)** yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sambil menekuni bisnis kuliner, ia mengikuti pelatihan advokat di Peradi.

"Saya percaya prinsip tabur-tuai. Kalau kita jujur dan berbuat adil, insya Allah hasilnya akan datang," ungkapnya penuh keyakinan.

Sementara itu, para penjahit rumahan harus mengejar target pesanan tanpa memperhatikan jam kerja. Tidak jarang mereka bekerja hingga larut malam demi mengejar upah, yang besarnya pun tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Hal ini membuat keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga menjadi sangat terganggu.

Pengalaman-pengalaman dari informan seperti Uki, Wahyu, Ani, serta pekerja rumahan lain menunjukkan bahwa *ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan keterbatasan* adalah realitas harian kelas pekerja prekariat di sektor informal. Mereka bukan tidak ingin maju, namun sistem ekonomi dan kebijakan yang ada belum berpihak secara memadai. Akibatnya masa depan yang dibayangkan oleh mereka belum bisa tergambar dengan jelas karena dinamika kapitalis dan minimnya ekspektasi fiksional mereka

4. Kurangnya Representasi dalam Serikat Pekerja

Kondisi seperti yang dialami oleh semua informan menunjukkan kondisi sulitnya pekerja prekariat informal berorganisasi. Hal ini karena mereka tidak berada di dalam suatu organisasi

yang memiliki perasaan dan kondisi yang sama. Perasaan senasib sepenanggungan itu menjadi penguat dan katalisator untuk menjalankan agenda bersama. Berbeda halnya dengan ojek Online misalnya, yang bernaung di bawah institusi tertentu seperti gojek dan grab, lebih mudah memobilisasi diri untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan yang bersifat informal, atau organisasi formal. Di sisi lain, mereka juga menghadapi hambatan hukum dan struktural dalam membentuk serikat pekerja di sektor informal. Hambatan hukum diantaranya karena tidak terorganisasikan sehingga mereka tidak memiliki legalitas kelembagaan, sedangkan secara struktural, bagi pekerja prekariat informal yang berpendidikan sekolah menengah merasa sulit maju jika masuk ke sektor formal. Mereka merasa di sektor informal ini adalah dunianya.

D. STRATEGI KELAS PEKERJA PREKARIAT DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Untuk mencapai kesejahteraan sosial ada beberapa strategi yang mereka lakukan secara mandiri.

1. Orientasi Nilai dalam Memandang Hidup

Semua informan dalam penelitian ini dalam cara pandang Weber melakukan tindakan rasional berorientasi nilai. Mereka meyakini apa yang dilakukan ini adalah hal baik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sudah sesuai dengan ketentuan agama yang mereka yakini. Mereka yakin rejeki semua sudah diatur oleh Allah SWT /Tuhan YME dan manusia disini hanya berusaha. Keyakinan (*faith*) seperti ini menjadi pendorong langkah mereka sehari-hari untuk berusaha lebih keras. Cara yang dilakukan dengan menjual barang dengan kualitas baik serta memberikan pelayanan pada pelanggan.

Upaya-upaya ini dalam jangka panjang menjadi modal sosial bagi para pekerja informal. Dengan mereka semakin dikenal, ada beberapa pesanan yang masuk dari kalangan dekat dalam jumlah besar. Misalnya ada yang dipesan oleh mesjid untuk kegiatan jumat berkah. Awalnya 1 mangkok soto dijual dengan harga 12 ribu, namun untuk kegiatan jumat berkah 1 mangkok soto dihargai 10 ribu dengan mangkok yang lebih kecil sambil pedagangnya juga bisa ikut bersedekah. Pola-pola seperti ini banyak dilakukan di berbagai tempat sebagai bentuk upaya pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan omset dan layanan kepada konsumen, para pedagang informal ini berupaya meningkatkan layanan mereka dengan cara berperilaku yang lebih baik dan ramah.

Selain itu mereka juga menjaga kualitas produk agar tidak turun dan tetap diminati oleh pelanggan.

2. Meningkatkan Keterampilan dan Pendidikan

Bagi pemilik usaha rumahan, banyak dari mereka yang melibatkan diri dalam program pemerintah seperti misalnya di Jakarta ada Program Jakpreneur. Pelatihan vokasional dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing. Dalam program Jakpreneur ini mereka diajarkan berbagai pelatihan dan pendampingan. Adapun program Jak Preneur ini terdiri dari 7 kegiatan yang dapat diikuti pelaku UMKM dalam upaya mencapai kemandirian, yang diantaranya; Pendaftaran Binaan, pelatihan, pemasaran, perizinan, permodalan, laporan keuangan, dan pendampingan.

Untuk itu dibutuhkan pendidikan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan digital. Sebagai contoh, pemerintah di Jakarta membuat kebijakan untuk membangun sekolah terbuka untuk menampung para pelajar yang tidak bisa mengakses sekolah formal. Salah satunya adalah SMP Terbuka Cakung, yang berafiliasi dengan SMPN 138 Jakarta. Sekolah ini hanya setingkat SMP maka, diberikan batasan umur paling tua 15 tahun bagi peserta yang akan mendaftarkan diri. Begitu juga untuk SMA, pemerintah juga membuka SMA terbuka dengan kurikulum yang lebih menekankan pada kecakapan hidup (*life skill*). Untuk pendidikan setara universitas, banyak kampus swasta yang menyediakan kuliah dengan harga terjangkau dan waktu kuliah yang lebih fleksibel. Misalnya di daerah Tangerang Selatan, ada sebuah universitas yang berkembang sangat cepat dalam 10 tahun terakhir. Jumlah mahasiswa setiap tahunnya yang selalu bertambah karena kebijakan fleksibilitas yang diterapkan oleh kampus. Sebagian besar mahasiswanya adalah para pekerja yang ingin meningkatkan karier dan pengetahuannya. Ditambah lagi kampus ini menawarkan jam kuliah yang ‘ramah’ dengan kondisi waktu pekerja yaitu dilakukan malam hari dan sabtu-minggu, serta penggunaan sistem pembayaran yang dapat diangsur. Banyak dari mahasiswa mereka yang berprofesi sebagai tenaga keamanan, petugas kebersihan, tenaga administrasi kantor dan pekerjaan klerikal lainnya.

3. Memanfaatkan Teknologi dan Platform Digital

Beberapa dari pekerja informal ini menggunakan platform digital untuk meningkatkan akses pekerjaan dan upah lebih baik. Seperti pedagang rumahan, mereka mendaftar menjadi mitra *Gofood*, *Grabfood* atau *Shopeefood*. Mereka tinggal menyediakan foto makanan yang ditawarkan, kemudian foto tersebut diunggah pada aplikasi yang sudah didaftarkan

sebelumnya. Dengan mengandalkan aplikasi digital ini memberikan tambahan peluang kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Mereka memberikan harga dasar makanan yang dijual, nanti secara otomatis pengguna aplikasi akan menaikkan harga sesuai kesepakatan di antara mereka.

Berdasarkan pengalaman para informan ini keberadaan platform digital ini cukup membantu memperluas jangkauan pasar mereka. Mereka yang awalnya hanya mengandalkan orang sekitar yang sedang lewat untuk membeli, sekarang ini juga melayani pemesanan lewat platform tanpa pengurangan harga dasar yang ditetapkan oleh penjual. Namun memang pembeli akan membayar lebih mahal karena, harga di platform berbeda dengan harga penjualan langsung, ditambah lagi konsumen juga harus membayar biaya jasa aplikasi dan jasa kirim.

Namun pola-pola seperti ini sudah menjadi keniscayaan karena kebutuhan di tingkat konsumennya pun ada. Peluang bisnis ini digunakan oleh pekerja prekariat sebagai katup penyelamat di saat situasi kerja sekarang tidak menentu. Hanya saja dibutuhkan kemampuan untuk membaca peluang pasar, dan inovasi agar produk yang dijual tidak selalu sama dengan barang dagang orang lain. Kemampuan menganalisis masa depan sebagai suatu fakta sosial akan membentuk persepsi yang lebih positif dalam menentukan strategi bisnis. (Beckert and Suckert 2021)

4. Membangun Solidaritas dan Kolektivitas

Pekerja prekariat formal banyak yang mendirikan serikat pekerja digital dan forum online untuk berbagi informasi dan advokasi. Namun berbeda halnya dengan pekerja informal, keinginan untuk berserikat dengan sesama pekerja informal juga tidak ada. Kebanyakan dari mereka tidak sempat untuk terlibat di komunitas. Adapun bagi yang terlibat di komunitas, yang biasanya mereka lebih banyak berasosiasi di tingkat lingkungan tempat tinggal. Biasanya dalam bentuk komunitas keagamaan, kepemudaan, majelis taklim, komunitas hobi, komunitas olahraga, dan sebagainya. Komunitas keagamaan misalnya mereka bertemu secara reguler di mesjid saat melaksanakan salat.

Bagi pekerja informal yang berpendidikan tinggi, mereka terkadang berasosiasi dengan teman sesama sarjana di bidangnya. Contohnya seperti informan Wahyu yang merupakan sarjana hukum, ia terlibat dalam organisasi ikatan sarjana hukum.

5. Mendorong Kebijakan Publik yang Berpihak pada Prekariat

Untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan para pekerja prekariat ini perlu dilakukan sejumlah upaya reformasi peraturan ketenagakerjaan agar lebih inklusif. Undang-undang cipta

kerja yang saat ini berlaku memang membuka peluang lebih besar untuk menerima masuknya investor, namun kurang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja jenis ini. Kondisi ini sebagai dampak dari pasar tenaga kerja bebas dengan ciri pekerjaan informal Pekerja prekariat diminta untuk menyisihkan sendiri uang yang mereka miliki untuk perlindungan kesehatan mereka. Seringkali karena anggaran yang ada terbatas, tindakan penyesihan uang ini tidak dilakukan karena diprioritaskan untuk kebutuhan keluarga yang lebih penting.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan jaminan sosial yang berlaku secara universal bagi semua pekerja. Saat ini BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan sudah ada di Indonesia, namun bagi pekerja prekariat mereka harus dengan kesadaran sendiri mendaftarkan diri mereka pada layanan tersebut. Sementara untuk pekerja formal, ada aturan yang mengikat bahwa mereka harus dilindungi oleh perusahaan. Walaupun di beberapa perusahaan ada juga yang nakal, dimana dia tidak mendaftarkan seluruh karyawannya, namun hanya sebagian saja dengan alasan efisiensi anggaran. Hal ini penting sebagai bentuk penerapan keadilan yang merata bagi seluruh kelas pekerja. (Fleurbay and Maniquet 2010)

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Pekerja prekariat dalam sektor pekerja informal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan individual dalam kesejahteraan sosial. Kondisi mereka ini bisa dikatakan lebih rentan dibandingkan pekerja prekariat di sektor formal, karena lebih memiliki ketidakpastian hidup karena tidak ada kontrak kerja, dan benar-benar mengupayakan sendiri kelangsungan hidupnya.

Sebagian besar informan dalam penelitian ini memilih untuk tidak berutang dalam menjalankan bisnisnya dan berusaha untuk tetap bersyukur dengan keadaan yang ada. Sebab dengan berutang menurut mereka kondisi yang dijalani akan lebih berat lagi karena beban bunga yang dikenakan dalam pinjaman. Namun bagi sebagian yang berutang memilih untuk mengambil risiko itu, daripada harus meminjam ke keluarga atau ke teman yang berpotensi akan memutuskan tali silaturahmi dan menjadi omongan keluarga jika ia belum bisa membayar. Yang menarik adalah cara mereka memandang hidup ini dengan optimis dan yakin akan ketentuan dari Tuhan YME atas hidup mereka.

Pentingnya peran kolektif dan kebijakan publik dalam mendukung kesejahteraan pekerja prekariat.(Spicker 1988)

2. Rekomendasi

Bagi Pekerja Prekariat: melakukan peningkatan keterampilan individu dengan mengikuti pelatihan yang ada di lingkungan sekitar atau yang diselenggarakan oleh kelurahan/desa. Kedua, membangun komunitas virtual yang dapat berbagi informasi tentang peluang kerja dan juga berfungsi sebagai media advokasi kebijakan.

Bagi Pemerintah: melakukan reformasi peraturan ketenagakerjaan dan sistem perlindungan sosial bagi pekerja prekariat yang bekerja di sektor formal dan informal.

Bagi Serikat Pekerja dan Komunitas: memperluas keanggotaan ke sektor informal dan pekerja gig lainnya.

F. ACKNOWLEDGEMENT:

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta yang sudah membiayai kegiatan penelitian ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

Beckert, Jens. 2018. *Uncertain Futures: Imaginaries, Narratives and Calculation in the Economy*.

Beckert, Jens, and Lisa Suckert. 2021. "The Future as a Social Fact. The Analysis of Perceptions of the Future in Sociology." *Poetics* 84 (February).
<https://doi.org/10.1016/j.poetic.2020.101499>.

BPS. 2018. *Keadaan-Angkatan-Kerja-Di-Indonesia-Februari-2018*.

BPS. 2020. *Keadaan-Angkatan-Kerja-Di-Indonesia-Agustus-2020*.

BPS. 2023. *Indikator-Pekerjaan-Layak-Di-Indonesia-2023*.

BPS. 2024. *KEADAAN ANGKATAN KERJA DI INDONESIA Labor Force Situation in Indonesia*.

Fleurbaey, Marc, and François Maniquet. 2010. *A Theory of Fairness and Social Welfare*. In *A Theory of Fairness and Social Welfare*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511851971>.

Spicker, Paul. 1988. *Principles of Social Welfare: An Introduction to Thinking about the Welfare State*. Routledge.

Standing, Guy. 2011. *The Precariat*. Bloomsbury.

Standing, Guy. 2014. *A Precariat Charter: From Denizens to Citizens*. Bloomsbury.

W. Lawrence Neuman. 2014. *Sosial Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh. Allyn Bacon.